



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan KH. Agus Salim No. 85, Telp. 0333-422400 Fax. 0333-417437  
Website: ppid.banyuwangikab.go.id, E-mail: ppid@banyuwangikab.go.id  
BANYUWANGI

---

**SALINAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;  
6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/54/KEP/429.011/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- Memperhatikan : Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi pada kajian yang diajukan oleh Kepala Bagian Hukum tanggal 14 Desember 2017 nomor 188/504/429.011/2017 perihal Kajian terhadap Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Informasi yang dikecualikan.

Memutuskan ...

Memutuskan

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 2 April 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Ketua,

TTD

**RAHMAWATI SETYOARDINI, SIP, MPA**

Pembina

NIP. 197509172002122008

Lampiran Penetapan PPID Kabupaten Banyuwangi

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 2 April 2024

Tentang : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</b>					
1.	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2.	Penilaian Kinerja Pegawai	UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian	Menimbulkan intervensi dan proses pelaksanaan, penataan/ pendayagunaan PNS	Mencegah intervensi dan penyalahgunaan wewenang dalam pendayagunaan PNS	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan/ tidak diungkap kepada publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
3.	Rincian DPA SKPD dan Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya (yang belum dilakukan pemeriksaan)	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 Ayat (1) dan (2)  UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I dan J	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai laporan keuangan selesai dilakukan pemeriksaan
4.	- Data Peralatan Sandi, Sistem Sandi, Material Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c	Memungkinkan penyalahgunaan (penyadapan, penyusupan, analisa dan pengambilan data) oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi sistem sandi negara (Sisdina)	Tidak terbatas
5.	- Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf 1  UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1, 2	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pimpinan
6.	- Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
7.	- Internet Protocol/IP Address Private.	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	Tidak Terbatas
8.	- Bandwidth Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak Terbatas
9.	- Kode Akses Elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak Terbatas
10.	- Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
11.	- Sistem Management Database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentan KIP Pasal 17 huruf j  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak Terbatas
12.	- Data Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
13.	- Perangkat khusus persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
14.	- Kunci Sistem Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi Berita / Jalur Komunikasi	Tidak terbatas
15.	- Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
16.	- Data Jalur Komunikasi VVIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
17.	- Data Frekuensi Radio Komunikasi Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
18.	- Berita Sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan negara	Selama Berita masih bersifat rahasia
19.	- Berita / Radiogram rahasia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
<b>Dinas Pertanian</b>					
20.	- Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
21.	- MoU / SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  Selama proses pengadaan barang/jasa

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
22.	- Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  Berdasarkan Perundang-undangan
23.	- Pengadaan / Pemeriksaan barang dan jasa	Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)  Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses kebijakan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  Jangka waktu ditetapkan berdasarkan perundang-undangan
24.	- Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Jangka waktu ditetapkan berdasarkan perundang-undangan
25.	- Daftar Penilaian Pekerjaan	<p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <p>Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP informasi yang tidak boleh diungkapkan</p> <p>UU No. 43 Th. 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p> <p>Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada pemma</p>
26.	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p> <p>Jangka waktu ditetapkan berdasarkan perundang-undangan</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			
27.	- Laporan Hasil Pemeriksaan	<p>Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p> <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p> <p>Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p> <p>Jangka waktu ditetapkan berdasarkan perundang-undangan</p>
28.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Keuangan:</li> <li>- SPJ berikut lampirannya</li> <li>- Dokumen Anggaran dan</li> <li>- Surat Pencairan anggaran</li> </ul>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17</p> <p>UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)</p>	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hokum	Selama masih berlaku
29.	- Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada yang tindaklanjut dari SKPD pengolah surat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
30.	- Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
31.	- Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum  Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum  Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
32.	- Soal Tes Rekrutmen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan tes
33.	- Data Nilai dan Rangkaing peserta ujian tes tertulis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS  Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya keputusan
34.	- Usulan calon penerima bantuan Sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat  Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya keputusan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
35.	- Dokumen proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
36.	- Laoran Pajak Pribadi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
37.	- Laporan Keuangan Daerah (LP2P)	UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
38.	- Dokumen pelaksanaan pekerjaan: - Konsultasi (perencanaan, pengawasan, dan manajemen konsrtuksi) antara lain produk laporan: - Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, MC 0, MC 100, berita acara dan sejenis lainnya	UU No.15/2004 tentang perbendaharaan Negara; UU NO 17/2004 ttg keuangan Negara; kepmen PU No 391/KPTS/14/2011 tentang penetapan klasifikasi informasi di lingkungan pekerjaan umum	Pekerjaan masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaannya	Menghidari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai proses audit selesai
39.	- Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota, dinas, beritaacara, surat keputusan;	Pasal 17 huruf I UU No 14/2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
40.	- Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya;	Pasal 17 huruf I dan j UU No.14 tahun 2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan; UU No.15/2004 ttg perbendaharaan Negara UU No.17/2005 ttg Keuangan Negara	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku
41.	- Proses usulan penilaian usaha perkebunan Negara/swasta	Pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No.12/1992 tentang sistem budidaya tanaman;  Pasal 17 huruf a UU No.14/2008 tentang KIP	Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan	Mengamankan hak pribadi/ perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkan penetapan kelas kebun
42.	- Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal	PP Nomor 44 tahun 1995 tentang penilaian tanaman pasal 41 (1)	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hukum	Terbatas sampai selesai pengusutan
43.	- Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman pasal 37 (3), pasal 38,39, dan 41, pasal 60 ayat (1) huruf f dan g nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi dan mengamankan petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya	Terbatasnya sampai selesai pengusutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
44.	- Proses penyelesaian sengketa perusahaan perkebunan besarnegara / swasta	UU Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 21, pasal 47 ayat 1; UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 a; UU Nomor tahun 2004 tentang perkebunan pasal 12	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hokum	Terbatas samapai selesainya sengketa
<b>Sekretariat DPRD</b>					
45.	- Data Anggota DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Data pribadi yang bersangkutan terungkap	Rahasia pribadi dapat terlindungi	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
46.	- Data - data hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h  Tatib DPRD Banyuwangi Pasal 63	Pembusukan karakter pimpinan /anggota DPRD	Hasil penyelidikan berjalan dengan baik, menjaga azas praduga tidak bersalah	Sampai ada keputusan Badan Kehormatan
47.	- Catatan, notulen, risalah rapat yang dinyatakan tertutup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf j  Tatib DPRD Banyuwangi Pasal 17	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sifat tertutup rapat terjaga	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>					
48.	- Berita acara Hasil Pengawasan dan Penanganan Pengaduan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	Penyalahgunaan menyangkut proses penegakan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Kelancaran proses perbaikan/kelancaran sengketa lingkungan	Tidak terbatas
49.	- Dokumen Lingkungan AMDAL/DPLH/ UKL-UPL DPLH	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf b  PP No 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan Permen LH No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Keterbukaan Masyarakat dalam proses AMDAL dan ijin Lingkungan	Penyalahgunaan oleh pihak lain karena masyarakat telah di libatkan proses penyusunannya	Perlindungan dari persaingan usaha	Tidak terbatas
50.	- Hasil Analisa Laboratorium Lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf 1  Permen LH No 16 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan pelanggan	Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>					
51.	- RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP  Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang perubahan ke dua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Membocorkan rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Berdasarkan peraturan yang berlaku
52.	- Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan serta Pelaporan Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP  Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang perubahan ke dua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengganggu pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk kepentingan umum	Melindungi rahasia negara	Berdasarkan peraturan yang berlaku
53.	- Dokumen kedinasan yang bersifat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Merugikan kepentingan bangsa dan negara	Melindungi rahasia negara	Berdasarkan peraturan yang berlaku
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi</b>					

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
54.	- Informasi biodata Penduduk byname by adress	UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	Akan disalahgunakan oleh yang tidak berhak	Menjaga kerahasiaan negara	Tidak Terbatas
55.	- Biodata penduduk, yang meliputi data-data pribadi penduduk	- UU No.23 tahun 2006 pasal 84 ayat 1 - UU No.24 tahun 2013 pasal 79 ayat 1, pasal 84 ayat 1 tentang administrasi kependudukan	Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tidak terbatas
56.	- Dokumen kependudukan dan catatan sipil	- UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan	Penyalahgunaan data kependudukan dan catatan sipil oleh pihak-pihak tertentu	Menjamin dan melindungi kerahasiaan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Sampai dengan terbitnya keputusan mendagri/gubernur/bupati/walikota tentang ijin untuk memperoleh data-data akta catatan sipil

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi</b>					
57.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen/laporan perencanaan penganggaran, pencapaian pertanggung jawaban (realisasi) seluruh kegiatan dinas (RKA, DPA Dan DPPA)</li> <li>2. Dokumen pengadaan barang baik menunjukkan langsung (PL) atau tender</li> <li>3. Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga (tukar guling dsb)</li> <li>4. Dokumen aset SKPD baik aset tetap, berjalan dan aset tetap lainnya</li> <li>5. Arsip vital seluruh SKPD dan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dibawah tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ol>	- UU RI No.14 Tahun 2008 tentang KIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitas dan keamanan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi khususnya SKPD yang bersangkutan akan terancam</li> <li>2. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah menurun</li> <li>3. Opini masyarakat menjadi negatif/buruk</li> <li>4. Citra pemerintahan menjadi buruk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitas dan keamanan pemerintahan kabupaten Banyuwangi khususnya SKPD yang bersangkutan akan terjaga</li> <li>2. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah meningkat</li> <li>3. Opini masyarakat menjadi lebih baik</li> <li>4. Citra pemerintah menjadi baik</li> </ol>	Tidak terbatas kecuali ada pemerintahan resmi dari instansi atau lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi</b>					
58.	- Surat- surat disposisi dan nota dinas	- UU RI No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU RI No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari PD pengeloh surat
59.	- RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Permendagri RI No. 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah	Membocorkan rahasia Negara	Melindungi rahasia Negara	Berdasarkan peraturan yang berlaku
60.	- Dokumen Pengelolaan keuangan tahun berjalan	- UU RI No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Permendagri RI No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Berdasarkan peraturan yang berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
61.	- Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah	- UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi, mengamankan Informasi yang di peroleh	Sampai dengan pelaksanaan audit
62.	- Laporan keuangan	- UU RI No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi, mengamankan Informasi yang di peroleh	Sampai dengan pelaksanaan audit
63.	- Dokumen pengadaan barang /jasa	- UU RI No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyek penilaian/penawaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
64.	- Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	- UU RI No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal huruf I dan j - Kappres RI No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyek penilaian/penawaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
65.	- Laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (Data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (Data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
66.	- Biodata Pegawai beserta Keluarga Pemkab Banyuwangi dalam bentuk dokumen/ arsip (hardcopy) maupun softcopy	UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
67.	- Biodata Pegawai Pemkab Banyuwangi yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	PP 11 Tahun 2017	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
68.	- Dokumen surat panggilan pegawai yang mendapat hukuman disiplin	PP 53 Tahun 2010	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
69.	- Dokumen berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin	PP 53 Tahun 2010	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
70.	- Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin	PP 53 Tahun 2010	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
71.	- Surat Keputusan Hukuman Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf a, h dan i	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
72.	- Biodata Pegawai yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan lebih dari satu	PP 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan PP 45 Tahun 1990	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
73.	- Dokumen Surat panggilan pegawai yang mendapat izin/penolakan Perceraian dan Perkawinan lebih dari satu	PP 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan PP 45 Tahun 1990	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
74.	- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapat izin/penolakan Perceraian dan Perkawinan lebih dari satu	PP 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagai mana diubah dengan PP 45 Tahun 1990	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
75.	- Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat izin/penolakan Perceraian dan Perkawinan lebih dari satu	PP 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagai mana diubah dengan PP 45 Tahun 1990	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
76.	- Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan /atau Korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
77.	- Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
78.	- Hasil Uji Kompetensi, Assesment dan Talent Pool terhadap Pejabat	UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017	Akan menimbulkan spekulasi dan persepsi yang berbeda	Hasil Uji Kompetensi, Assesmet dan Talent Pool dapat dimanfaatkan tim Baperjakat tanpa adanya intervensi dari pihak luar	Tidak terbatas
79.	- Hasil Pertimbangan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)	UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017	Akan menimbulkan kegaduhan dan persepsi yang berbeda	Hasil Keputusan PKK bisa eksekusi dengan baik	Tidak terbatas
80.	- Rincian Usul Penetapan Kebutuhan PNS	UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017	Akan menimbulkan kegaduhan dan spekulasi	Penetapan akan bisa diselesaikan dengan kebutuhan yang diprioritaskan	Setelah keluar surat dari Kementerian PAN RB tentang Kebutuhan PNS
81.	- Penetapan/Keputusan PKK kepada PNS	UU No. 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017	Terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Tidak terbatas
82.	- Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen Keuangan SPJ berikut lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17: - UU No. 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama masih berlaku
83.	- Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelolah surat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
84.	- Dokumen proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
85.	- Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
86.	- Rincian harga perkisaran sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Mempelancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
<b>Dinas Pekerjaan Umum Pengairan</b>					
87.	- Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan atau data dalam bentuk hardcopy maupun softcopy	PP. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendali sistem pemerintah (SPIP) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf, I	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen	Selama masih berlaku
88.	- Lembar disposisi surat masuk dan keluar	UU No. 43 tahun 2008 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1, 2 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf, I UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Mengungkapkan merencanakan atau surat menyurat yang sifatnya di rahasiakan  Dapat mengungkap data pribadi PNS	Mengamankan proses penyusunan kebijakan  Dapat melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas  Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	- Dokumen pengelolaan (Kenaikan pangkat KGB, Pensiun, Taspen, Dark, Karis, Karpeg, dan Material PNS, dll)				
89.	- Rencana kerja anggaran dan dokumentasi pelaksanaan anggaran	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
90.	- Penilaian Kinerja Pegawai	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian	Menimbulkan intervensi dan proses pelaksanaan, penataan/pendayagunaan PNS	Mencegah intervensi dan penyalahgunaan wewenang dalam pendayagunaan PNS	Selama UU membatasi untuk dirahaskan/ tidak diungkap kepada publik
91.	- Dokumen tahunan disiplin PNS	PP No. 20 tahun 1940 tentang kebijakan sebagai PNS	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai waktu terukur disiplin selesai
92.	- Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1, 2			
93.	- Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan SAPP, termasuk buku bendahara dan buku pembantu lainnya	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf J UU NO.43 tahun 2009 Tentang kearsipan pasal 44 ayat 1, 2 dan pasal 66 ayat 3	Akan menghambat proses audit karena adanya pengungkapan	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan audik	Sampai terhitung laporan pemeriksaan keuangan yang telah diperiksa/di audit

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		UU No.15 tahun 2008 tentang perbendaharaan negara UU No.17 tahun 2008 tentang keuangan negara			
94.	- Penjanjia LP2P	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Mengungkap data pribadi PNS (Pejabat) yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan dan pribadi pegawai	Tidak terbatas
95.	- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	UU No.14 tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf H	Meengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan dan Prbadi PNS	Tidak terbatas
96.	- Data obyek pajak dan retribusi	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 40 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H Perda No.13 tahun 2011 tentang jasa retribusi	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database obyek pajak dan retribusi	Tidak terbatas
97.	- RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	Sampai dilaksanakan audit
98.	- Rincian Harga Perkiraan Sendiri	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j Kepres no. 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
99.	- Dokumen penawaran barang/jasa	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j Kepres no. 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Meningkatkan obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
100.	- Dokumen proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa	Sampai diketahui pemenangnya
101.	- Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Kemen PU No. 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi pihak-pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan serah terima ke 2
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi</b>					
102.	- DPA	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	- Dapat menghambat proses penyerapan anggaran - Dapat menimbulkan perbedaan persepsi	Melindungi kerahasiaan dokumen SKPD	1 Tahun
103.	- Jadwal Razia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Membahayakan Keselamatan Petugas Dapat terjadi kegagalan akibat kebocoran informasi.	Proses Penyelidikan dan Penyidikan Menjadi Lancar	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
104.	- RKA	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat memicu kesenjangan sosial antar SKPD	Melindungi kerahasiaan dokumen SKPD	1 Tahun
105.	- Rencana penerbitan / penindakan Penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar Proses Penegakan Hukum dan Penyusunan Kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
106.	- Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses Penegakan Hukum  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar Proses Penegakan Hukum dan Penyusunan Kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	Sampai dengan selesainya Proses penanganan
107.	- Informasi data pribadi penegak Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat Proses Penegakan hukum  Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak Perda yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
108.	- Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Selama proses pemeriksaan
109.	- Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN - UU No.8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	1 Tahun
<b>KECAMATAN</b>					
110.	<b>Kecamatan Srono</b>  - Data Pribadi Penduduk	Pasal 79 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
111.	- Akta / Wasiat / Ahli waris	pasal 17 huruf I UU No.14/2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
112.	- Penilaian Kinerja Pegawai	1. pasal 17 huruf I UU No.14 14/2008 2. UU No.43/1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan atau pihak yang berwenang
113.	- Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No.14 Th. 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (Data Kekayaan Pribadi)	Melindungi data kekayaan pribadi yang bersifat Rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
114.	- Sistem pengelolaan keuangan dan Database pengelolaan keuangan daerah secara Online	1. pasal 17 huruf e & huruf j UU No.14 Th. 2008 tentang KIP 2. UU No.11/2008 ttg ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya penggantian password oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kesalahan informasi	Tidak terbatas
115.	- DPA	- Perda tentang APBD No.10 Th. 2016 - Perbub penjabaran APBD No.83 Th.2016 - Peraturan kepala daerah ttg pedoman pelaksanaan APBD No.40 Th 2016	Penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berhak	Menghindari terganggunya pelaksanaan kegiatan SKPD	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
116.	Kecamatan Wongsorejo  Biodata Elektronik PNS (DataBase)	UU No.14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
117.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No.14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
118.	- Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf (i) dan huruf (j)</li> <li>Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena memperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
119.	- Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf (i) dan huruf (j)</li> <li>Keppres No.80/2003 beserta perubahannya</li> </ul>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
120.	- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b)</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Tidak terbatas
121.	- Hasil evaluasi kinerja pegawai melalui SKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (b)</li> </ul>	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
122.	- Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.17/2003 tentang keuangan Negara</li> <li>• UU No.14/2008 tentang KIP</li> </ul>	Mengungkapkan data keuangan yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan data keuangan	Tidak terbatas
123.	<b>Kecamatan Singojuruh</b>  - Biodata elektronik dan non elektronik PNS (Data base)	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
124.	- Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No.43/1999 tentang kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku/atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
125.	- Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun KIP ;Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2)UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
126.	- Akta, Wasiat	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
127.	- Dokumen perizinan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan dokumen rahasia perorangan/ perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/ perusahaan yang bersifat rahasia	Selama dokumen masih berlaku
128.	- Data indentitas penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)
129.	- Hasil wawancara/diagnose/bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
130.	- Data pribadi peserta bimbingan social pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
131.	- Dokumen laporan pengaduan individu/ masyarakat	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku
132.	- Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP; UU No. 11/2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
133.	- Laporan pajak pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
134.	- Dokumen pertanggungjawabkan keuangan termasuk buku bendaharawah dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP; UU No.17/2003 tentang keuangan Negara	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku
135.	- Laporan keuangan kecamatan singojuruh yang belum diudit	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
136.	- Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak – pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku
137.	- Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan kecamatan singojuruh yang menurut sifatnya harus dirasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
138.	- Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.432 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
139.	- Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Pasal 17 huruf UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses sengketa/ penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)
140.	- Rencana penerbitan/penindakan dan penegahan pada objek tertentu	Pasal 17 huruf a UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana	Sampai selesai pelaksanaan
141.	- Penyaringan bakal calon kepala desa	Pasal 17 huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
142.	- Daftar anggota/ orang yang terlibat organisasi terlarang	Pasal 17 huruf h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Selama masih berlaku; samapai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang
143.	- Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
144.	- Dokumen penawaran pengadaan barang / jasa	Pasal 17 b UU No. 14 tahun 2008 tentang UU KIP; keputusan menteri pekerjaan umum NO. 391/KPTS/M/2011	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
145.	- Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17 b UU No.14 tahun 2008 tentang UU KIP; keputusan menteri pekerjaan umum NO. 391/kpts/m/2011	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Perlindungan para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan kedua
146.	<b>Kecamatan Kabat</b> - Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
147.	- Dokumen/berkas/arsip PNS	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
148.	- Rincian HPS (harga parkir sendiri)	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan j kepres nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
149.	- Dokumen penawaran kontrak	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan huruf j kepres nomor 80 tahun 2003 beserta perubahanya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/ jasa
150.	- Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN)	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Tidak terbatas
151.	- Hasil evaluasi kinerja pegawai melalui SKP	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
152.	- Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah	Undang-Undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data keuangan yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan data keuangan	Tidak terbatas
153.	- Laporan keuangan sebelum di audit	Undang-Undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data yang bersifat khusus	Menjaga kerahasiaan dan keuangan	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
154.	- Lembar disposisi surat masuk dan keluar	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data yang bersifat khusus	Menjaga kerahasiaan	Tidak terbatas
155.	- Nota dinas	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data yang bersifat khusus	Menjaga kerahasiaan	Tidak terbatas
156.	<b>Kecamatan Pesanggaran</b>  - Data Pribadi Penduduk	UU No.24 tahun.2013 pasal 79 ayat (1) tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
157.	- Akta / wasiat/ ahli waris	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf l	Dapat disalah gunakan oleh pihak2 tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
158.	- Penilaian Kinerja Pegawai	1. UU No.14/2008 pasal 17 2. UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan / pihak yang berwenang
159.	- Laporan pajak pribadi (LP2P)	UU No.14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
160.	- Sistem pengelolaan keuangan & database pengelolaan keuangan daerah secara online	1. Pasal 17 huruf e & huruf j UU No.14/2008 ttg KIP 2. UU No.11/2008 ttg ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya penggantian password oleh orang tidak bertanggung jawab dan kesalahan informasi di mata publik	Tidak terbatas
161.	<b>Kecamatan Gambiran</b>  - Data pribadi Penduduk	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17  UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79 ayat 1 Tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama belum ada perubahan keputusan dari pejabat yang berwenang
162.	- Akta/wasiat/Ahli waris	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
163.	- Laporan pajak pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
164.	- Sistem Pengelolan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah secara online	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf e, j	Penyalah gunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari penggunaan password oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kesalahan informasi dimata publik	Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
165.	- Laporan Pertanggung jawaban ADD dan DD	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h Perbub Banyuwangi nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan penggunaan ADD/DD kepada Bupati	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia keuangan negara	Tidak terbatas
166.	<b>Kecamatan Tegalsari</b>  - Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: - Dokumen Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPJ Berikut lampirannya</li> <li>• Dokumen anggaran dan otoritasnya</li> <li>• Surat pencairan anggaran</li> </ul>	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c  UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1,2	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum	Selama masih berlaku
167.	- Dokumen proses pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i, j  Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
168.	- Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i, j  Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Sampai diketahui pemenangnya
169.	- Dokumen penawaran dari penyedia barang/ jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i, j  Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
170.	- Susunan kepanitian pengadaan barang/ jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
171.	- Laporan pajak pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan dari wajib pajak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
172.	- Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1  UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurn	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
173.	- Kertas kerja pemeriksaan, Laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurn	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
174.	<b>Kecamatan Bangorejo</b>  - Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat pribadi	Melindungi data pasien	30 Tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang dibuka untuk umum
175.	- Dokumen penanganan perkara	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi data pasien	Tidak terbatas/kecuali karena ketahuan UU
176.	- Surat/Memo/Catatan Internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan UU

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
177.	- Proses hukum PNS bermasalah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti. Mengganggu/ menghambat proses hukum	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan UU
178.	- RKA/DPA SKPD	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dapat mengganggu penyelesaian kegiatan di SKPD	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan dokumen pemerintah	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan UU
179.	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa	Dapat mengganggu penyelesaian kegiatan di SKPD	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan dokumen pemerintah	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan UU
180.	- Surat pertanggung jawaban APBDes (SPJ APBDes)	UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa	Dapat mengganggu penyelesaian kegiatan di SKPD	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan dokumen pemerintah	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan UU
181.	- Hukuman disiplin PNS	PP No. 30 Tahun 1980 Tentang kewajiban sebagai PNS	Mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai waktu hukuman disiplin selesai sampai dilaksanakan